



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2023	2023		2022
1	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
3	Pajak Daerah				
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				
7	Pajak Air Permukaan				
8	Pajak Rokok				
9	Retribusi Daerah	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
10	Retribusi Jasa Umum				
11	Retribusi Jasa Usaha	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu				
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
21	Hasil Kerja Sama Daerah				
22	Jasa Giro				
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
24	Pendapatan Bunga				
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing				
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah				
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
32	Pendapatan dari Pengembalian				
33	Pendapatan BLUD				
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan				
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)				
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf				
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
41					
42	PENDAPATAN TRANSFER				
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
44	Dana Perimbangan				
45	Dana Insentif Daerah (DID)				
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
47	Pendapatan Bagi Hasil				
48	Bantuan Keuangan				
49	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
50					
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
52	Pendapatan Hibah				

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2023	2023		2022
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
58	Dana Darurat				
59	Dana Darurat				
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
61	Lain-lain Pendapatan				
62	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
64					
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	826.840.000,00	103,36	616.000.000,00
66					
67	BELANJA DAERAH	675.016.997.000,00	656.153.301.617,00	97,21	614.386.948.554,00
68	BELANJA OPERASI	656.033.805.000,00	637.319.365.175,00	97,15	609.709.620.380,00
69	Belanja Pegawai	114.268.943.000,00	109.202.844.869,00	95,57	104.585.679.751,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	36.178.597.000,00	35.724.187.717,00	98,74	36.595.736.405,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.146.487.000,00	48.295.141.298,00	98,27	42.818.815.906,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.834.995.000,00	1.481.055.950,00	80,71	718.220.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.094.000,00	204.972.404,00	84,32	240.276.440,00
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	26.865.770.000,00	23.497.487.500,00	87,46	24.212.631.000,00
76	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP				
77	Belanja Pegawai BOS				
78	Belanja Pegawai BLUD				
79	Belanja Barang dan Jasa	108.543.747.000,00	105.889.105.306,00	97,55	87.164.830.629,00
80	Belanja Barang	18.583.886.000,00	18.312.719.116,00	98,54	13.356.118.735,00
81	Belanja Jasa	49.005.318.000,00	47.865.333.249,00	97,67	43.570.453.873,00
82	Belanja Pemeliharaan	10.572.499.000,00	10.355.794.179,00	97,95	5.683.510.875,00
83	Belanja Perjalanan Dinas	30.322.169.000,00	29.325.433.762,00	96,71	22.639.540.446,00
84	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.875.000,00	29.825.000,00	49,81	1.915.206.700,00
85	Belanja Barang dan Jasa BOP				
86	Belanja Barang dan Jasa BOS				
87	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
88	Belanja Bunga				
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat				
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain				
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
93	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)				
94	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD				
95	Belanja Subsidi				
96	Belanja Subsidi kepada BUMN				
97	Belanja Subsidi kepada BUMD				
98	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta				
99	Belanja Subsidi kepada Koperasi				
100	Belanja Hibah	433.221.115.000,00	422.227.415.000,00	97,46	417.959.110.000,00
101	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	304.470.150.000,00	304.470.150.000,00	100,00	-
102	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
103	Belanja Hibah kepada BUMN				
104	Belanja Hibah kepada BUMD				
105	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	128.750.965.000,00	117.757.265.000,00	91,46	417.959.110.000,00
106	Belanja Hibah Dana BOS				
107	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
108	Belanja Bantuan Sosial				
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
111	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
112	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
113	Jumlah Belanja Operasi	656.033.805.000,00	637.319.365.175,00	97,15	609.709.620.380,00
114					
115	BELANJA MODAL	18.983.192.000,00	18.833.936.442,00	99,21	4.677.328.174,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2023	2023		2022
116	Belanja Modal Tanah				
117	Belanja Modal Tanah				
118	Belanja Modal Tanah BLUD				
119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.983.192.000,00	18.833.936.442,00	99,21	4.677.328.174,00
120	Belanja Modal Alat Besar				
121	Belanja Modal Alat Angkutan	10.480.393.000,00	10.469.893.000,00	99,90	1.732.000.000,00
122	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.450.000,00	3.400.000,00	98,55	-
123	Belanja Modal Alat Pertanian				
124	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.982.458.000,00	2.953.234.432,00	99,02	1.274.909.598,00
125	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.575.591.000,00	3.485.072.010,00	97,47	604.619.961,00
126	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
127	Belanja Modal Alat Laboratorium				
128	Belanja Modal Alat Persenjataan				
129	Belanja Modal Komputer	1.941.300.000,00	1.922.337.000,00	99,02	1.065.798.615,00
130	Belanja Modal Alat Eksplorasi				
131	Belanja Modal Alat Pengeboran				
132	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
133	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
134	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
135	Belanja Modal Alat Peraga				
136	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
137	Belanja Modal Rambu-rambu				
138	Belanja Modal Peralatan Olahraga				
139	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
140	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
141	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
142	Belanja Modal Bangunan Gedung				
143	Belanja Modal Monumen				
144	Belanja Modal Bangunan Menara				
145	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				
146	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
147	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
148	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
149	Belanja Modal Bangunan Air				
150	Belanja Modal Instalasi				
151	Belanja Modal Jaringan				
152	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD				
153	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
154	Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
155	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga				
156	Belanja Modal Hewan				
157	Belanja Modal Biota Perairan				
158	Belanja Modal Tanaman				
159	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
160	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				
161	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
162	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
163	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
164	Belanja Modal Aset Lainnya				
165	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud				
166	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
167	Jumlah Belanja Modal	18.983.192.000,00	18.833.936.442,00	99,21	4.677.328.174,00
168					
169	BELANJA TAK TERDUGA				
170	Belanja Tidak Terduga				
171	Belanja Tidak Terduga				
172	Jumlah Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
173					
174	BELANJA TRANSFER				
175	Belanja Bagi Hasil				
176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
177	Belanja Bantuan Keuangan				
178	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
179	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
180	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
181	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
182	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
183	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2023	2023		2022
184					
185	JUMLAH BELANJA DAERAH	675.016.997.000,00	656.153.301.617,00	97,21	614.386.948.554,00
186					
187	SURPLUS/DEFISIT	(674.216.997.000,00)	(655.326.461.617,00)	97,20	(613.770.948.554,00)
188					
189	PEMBIAYAAN DAERAH				
190	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
191	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
192	Pelampauan Penerimaan PAD				
193	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer				
194	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
195	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan				
196	Penghematan Belanja				
197	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan				
198	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan				
199	Sisa Belanja Lainnya				
200	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				
201	Pencairan Dana Cadangan				
202	Pencairan Dana Cadangan				
203	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
204	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
205	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
206	Penerimaan Pinjaman Daerah				
207	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
208	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain				
209	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
210	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
211	Pinjaman Daerah dari Masyarakat				
212	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
213	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat				
214	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
215	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD				
216	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN				
217	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi				
218	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat				
219	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD				
220	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
221	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD				
222	Divestasi BLUD				
223	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
224					
225	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
226	Pembentukan Dana Cadangan				
227	Pembentukan Dana Cadangan				
228	Penyertaan Modal Daerah				
229	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
230	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
231	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
232	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat				
233	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
234	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
235	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
236	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat				
237	Pemberian Pinjaman Daerah				
238	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat				
239	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
240	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD				
241	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN				
242	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi				
243	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat				
244	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD				

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2023	2023		2022
245	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
246	Pinjaman BLUD				
247	Investasi BLUD				
248	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
249					
250	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
251					
252	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(674.216.997.000,00)	(655.326.461.617,00)		(613.770.948.554,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Semarang, 31 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001